

Tiga SKPD Berpotensi Langgar Permendagri

● Kegiatan Mendahului APBDP 2014

SEMARANG - Pelaksanaan kegiatan mendahului APBD Perubahan 2014 di tiga SKPD, yakni Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Ciptakarur), dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jateng berpotensi melanggar Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Saat ini pendalaman laporan keuangan Pemprov Jateng tahun anggaran 2014 sedang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut ahli akuntansi pemerintahan dari Universitas Diponegoro, Abdul Rahman, jika BPK mendalami lagi laporan kegiatan mendahului APBD Perubahan 2014, bisa jadi ada potensi pelanggaran di sana.

Sebab, berdasarkan Permendagri No 59 Tahun 2007 dan Permendagri No 21 Tahun 2011, kegiatan mendahului perubahan boleh dilakukan jika dalam kondisi atau program darurat/mendesak.

"Kondisi darurat itu kondisi akibat bencana alam, bencana sosial seperti kerusuhan. Apakah tanggul jebol itu masuk dalam kategori bencana, silakan dinilai sendiri," tuturnya.

Dalam Permendagri No 21 Tahun 2011 pasal 162, dijelaskan keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak

diharapkan terjadi secara berulang, berada di luar kendali, dan pengaruh pemda, serta memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Keadaan Darurat

Dalam keadaan darurat, pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Dalam rapat kerja antara Badan Anggaran DPRD Jateng dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jateng, di Ruang Banggar Gedung Berlian, Ra-

bu (24/6), Plt Sekda Joko Sutrisno menyatakan pada 2014 tidak ada kegiatan mendahului anggaran. Namun, faktanya lelang dilakukan mendahului anggaran, dan pelaksanaannya setelah penetapan APBD Perubahan 2014.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi menuturkan, menurut TAPD sesuai surat yang diajukan ke DPRD Jateng, permohonan yang disampaikan adalah kegiatan mendahului anggaran perubahan 2014. Karena itu Komisi D tidak membahas.

"Sebab, anggaran itu terpisah dari APBD Perubahan 2014. Di samping itu, kegiatan mendahului anggaran adalah untuk kegiatan mendesak seperti terjadi bencana alam. Tapi ternyata dimasukkan ke kegiatan rutin anggaran perubahan," paparnya usai rapat.

Untuk mendalami hal tersebut, DPRD minta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan. Saat ini, DPRD sedang menyiapkan data-data yang dibutuhkan.

"Secepatnya permintaan resmi ke BPK akan kita lakukan. Sekarang data sedang disusun, kemungkinan satu sampai dua hari ini akan kita sampaikan resmi ke BPK," ujarnya.

Selain itu, pemeriksaan lanjutan oleh BPK diperlukan untuk soal tambahan penghasilan pegawai (TPP). Pasalnya, kala itu DPRD belum pernah diberitahu soal TPP.

"Saya dan pimpinan yang lain memang ikut menandatangani. Itu benar. Tapi yang saya tandatangi adalah penetapan Perda APBD 2014, bukan soal TPP, terangnya. (J8,H81-71)